

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I. Latar Belakang Masalah

Dalam pembangunan desa peranan elite dan juga masyarakat sangat dibutuhkan karena kedua pihak tersebut sangat berkaitan dengan proses pembangunan desa. Elite sebagai kelompok yang memiliki kedudukan dan kekuasaan berfungsi sebagai pembuat keputusan dalam pembangunan sedangkan masyarakat berfungsi untuk proses pembangunan. Elite desa dibagi menjadi 2, pertama elite formal yaitu seseorang atau kelompok yang memiliki kekuasaan dan seseorang atau kelompok tersebut memiliki jabatan dalam pemerintahan desa seperti kepala desa (lurah), sekretaris desa (carik) dan perangkat desa lainnya, kedua elite informal yaitu seseorang atau kelompok yang memiliki kekuasaan dan seseorang atau kelompok tersebut bukan merupakan bagian dari pemerintahan desa meskipun seseorang atau kelompok tersebut memiliki wewenang dalam menentukan keputusan, mereka seperti pengusaha dan tokoh masyarakat baik politik, agama, adat dan sebagainya.<sup>1</sup>

Dalam pembangunan desa peranan elite berfungsi untuk membuat keputusan terhadap pembangunan desa. Pembangunan desa digunakan para elite untuk mempertahankan jaringan-jaringan atau kekuasaan di daerah desa. Peran elite dan lembaga desa bertujuan untuk mengontrol dan mengintervensi pembangunan desa, dalam kontrol dan intervensi elite sendiri terdapat unsur

---

<sup>1</sup> [http://pustakaku-pustakakita.blogspot.com/2009/07/politik-dan-pembangunan-desa.html?m=1\(05-11-2014,13.00\)](http://pustakaku-pustakakita.blogspot.com/2009/07/politik-dan-pembangunan-desa.html?m=1(05-11-2014,13.00))

politis. Intervensi elite dalam pembangunan secara tidak langsung telah membuat pola hubungan yang terjadi karena kekuasaan elite tersebut, dimana hubungan tersebut menganggap bahwa elite telah memberikan kontribusi untuk masyarakat desa dan kepentingan masyarakat desa dan timbal baliknya untuk elite adalah masyarakat desa akan berkontribusi dan mendorong tercapainya tujuan elite untuk meraih kepentingan di daerah desa tersebut, baik untuk mempertahankan kekuasaan maupun untuk memenangkan elite dalam pemilihan umum.

Pembangunan desa merupakan wujud untuk mensejahterakan masyarakat desa, yaitu dengan membangun infrastruktur desa untuk memperlancar kegiatan masyarakat desa dan program-program yang dapat memberikan akses untuk mempermudah masyarakat desa mendapatkan pelayanan dari pemerintah demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat desa dan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa.

Dalam pembangunan desa terdapat elite berfungsi sebagai pembuat keputusan dan memiliki wewenang untuk mengontrol pembangunan desa. Di sebagian desa tidak hanya elite formal yang berperan akan tetapi ada juga elite informal yang ikut berperan dalam pembangunan desa, elite informal ini memiliki kekuasaan ditingkat kabupaten maupun pemerintahan di atasnya sehingga mempermudah elite informal ini untuk mencari dana alokasi untuk pembangunan desa. Elite informal menggunakan kekuasaan dan jaringan di pemerintahan untuk mencari dana alokasi untuk pembangunan desa yaitu dengan adanya hubungan politik antara elite informal dengan pemerintah sehingga dana alokasi pembangunan desa mudah didapatkan oleh elite informal. Elite informal

membantu mengalokasikan dana pembangunan desa untuk membantu perkembangan desa tersebut, akan tetapi bantuan alokasi dana tersebut dijadikan instrumen oleh elite informal untuk kepentingannya sendiri yaitu untuk menaikkan popularitas dan elaktibilitas elite informal di desa tersebut. Hal ini merupakan penyalahgunaan kekuasaan, dimana dana alokasi pembangunan desa sudah menjadi hak bagi masyarakat desa untuk mendapatkannya akan tetapi kurangnya pengetahuan masyarakat desa terhadap pengalokasian dana pembangunan desa membuat elite informal untuk memanfaatkan kondisi tersebut untuk tercapainya kepentingan pribadi yaitu untuk menaikkan popularitas dan elaktibilitas elite informal di desa tersebut. Dengan memberikan bantuan dana alokasi pembangunan desa dan kurangnya pengetahuan masyarakat desa, dana tersebut dijadikan instrumen oleh elite informal untuk menaikkan popularitas dan elaktibilitas untuk memenangkan elite dalam pemilihan umum. Hubungan yang terjadi dalam kasus tersebut elite informal telah memberikan dana alokasi pembangunan desa untuk kepentingan masyarakat desa dan secara tidak langsung meminta timbal balik dari masyarakat desa untuk menaikkan popularitas dan elaktibilitas elite informal demi memenangkan dalam pemilihan umum.

Berdasarkan dari pengertian pembangunan sendiri, pembangunan daerah merupakan usaha sistematis dari berbagai pelaku, baik umum pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya sehingga peluang baru untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan.<sup>2</sup> Pembangunan mempunyai pengertian dinamis, maka tidak boleh dilihat dari konsep yang statis. Pembangunan juga mengandung orientasi dan kegiatan yang tanpa akhir. Proses pembangunan merupakan perubahan sosial budaya. Pembangunan menunjukkan terjadinya suatu proses maju berdasarkan kekuatan sendiri, tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya.<sup>3</sup> Secara ilmu, pembangunan ekonomi, politik dapat diklarifikasikan secara sosiologis ke dalam tiga kategori. Pertama, masyarakat yang masih bersifat tradisional; kedua adalah masyarakat yang bersifat peralihan; ketiga adalah masyarakat maju. Ketiga kategori tersebut saling berkaitan, karena berada dalam satu negara. Semua negara di dunia masih memiliki ketiga kategori tersebut, meskipun dalam negara modern sekalipun.<sup>4</sup>

Pembangunan merupakan perwujudan dari modernisasi. Dalam artian tersebut, pembangunan akan membawa perubahan dari sistem yang tradisional kepada sistem yang modern atau sistem yang serba menggunakan kecanggihan teknologi baik dari segi pendidikan, kesehatan, permukiman masyarakat, sarana dan prasarana dalam daerah, merubah sikap masyarakat baik sosial maupun politik, dan merubah semua aspek yang ada dalam daerah. Pembangunan telah diartikan modernisasi yang bertujuan merubah kehidupan sosial-politik dalam masyarakat, pembangunan juga di iringi dengan kemajuan teknologi yang dapat membantu kehidupan masyarakat untuk lebih mudah dalam melakukan hal apapun. Pembangunan sebagai wujud perubahan baik dari segi sosial, ekonomi,

---

<sup>2</sup>Anon, Pembangunan Daerah, 2011

<sup>3</sup>Dyah Hapsari, Proses Pembangunan, 2009

<sup>4</sup>Ibid

dan politik. Dengan adanya pembangunan diharapkan akan adanya perubahan yang nantinya dapat membantu kelancaran kehidupan masyarakat. Di negara Indonesia sendiri, pembangunan akan dijadikan aspek yang diutamakan untuk membantu proses kehidupan masyarakat. Pembangunan di Indonesia harus segera dilaksanakan untuk membantu Indonesia sendiri agar tidak tertinggal dengan negara lain, di negara lain telah melakukan berbagai pembangunan dan hal tersebut harus diperhatikan dengan baik oleh Indonesia demi tujuan membangun negeri ini untuk menjadi negara yang maju dan berkembang.

Dalam pembangunan di Indonesia kini telah menyentuh ke tingkat daerah tidak hanya di kota-kota saja akan tetapi kini telah diupayakan pembangunan di tingkat desa dengan tujuan tidak terjadi kesenjangan antara kota dan desa. Pembangunan di desa kini telah menjadi upaya tersendiri bagi pemerintah, terbukti bahwa sekarang desa telah diberikan wewenang untuk mengelola anggaran sendiri. Untuk pembangunan desa, anggaran telah disiapkan oleh pemerintah untuk membangun berbagai sarana prasarana yang ada di desa baik dari segi pertanian, pendidikan, kesehatan, jalur transportasi, dan berbagai segi lainnya yang ada di desa.

Pembangunan desa menarik untuk diteliti karena saat ini banyak program dari pemerintah yang membantu perkembangan dan pertumbuhan desa baik segi ekonomi maupun tingkat kesejahteraan masyarakat. Program pemerintah yang saat ini dilaksanakan di desa adalah PNPM Mandiri, Alokasi Dana Desa (ADD), RASKIN, BLT, JAMKESMAS, JAMKESDA. Program-program pemerintah tersebut sebagai wujud perhatian pemerintah terhadap masyarakat desa dan dengan

program-program tersebut dapat membantu pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Dalam hal pembangunan ditentukan oleh kelompok elite yaitu kelompok yang menentukan keputusan dan juga yang merencanakan, dalam pembahasan ini menjelaskan bahwa dalam pembangunan desa dibutuhkan adanya distribusi kekuasaan. Kekuasaan sendiri merupakan kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku dari seseorang atau kelompok lain. Kekuasaan berada pada orang atau kelompok yang memiliki pengaruh pada orang atau kelompok lain, orang atau kelompok yang memiliki kekuasaan disebut elite. Pembangunan desa atau tidaknya tergantung dari peranan elite sendiri dan bisa dikatakan bahwa pembangunan bergantung pada peranan elite.

Pembangunan merupakan proses perubahan masyarakat dalam segala aspek yang dilakukan oleh sekelompok kecil masyarakat yang disebut kaum elite. Toynbee (lauer, 57, 1993) mengemukakan bahwa berhasilnya pencapaian pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat pada umumnya. Tidak saja dari pengambil kebijakan tertinggi, para perencana, aparatur pelaksana operasional, tetapi juga petani, nelayan, buruh, pedagang kecil, para pengusaha dan lain-lain, atau keterlibatan pada grass roots (akar rumput) yaitu masyarakat paling bawah.<sup>5</sup>

Walaupun dikatakan bahwa tanggung jawab pembangunan dipikul oleh semua kelompok dalam masyarakat, tetapi suatu hal yang tak dapat diingkari bahwa tanggung jawab yang paling besar terletak dipundak golongan elite.

---

<sup>5</sup>Wahyuni, Peranan Elit Formal dalam Pembangunan Masyarakat, Hal 1, UIN Alaudin Makasar, 2010

Dengan memberdayakan elite-elite berpengaruh, sedikit banyak akan memberikan kontribusi positif pada sukses atau gagalnya menggalang partisipasi di kalangan masyarakat. Pembicaraan mengenai pembangunan, sesungguhnya berkaitan dengan keterlibatan seluruh masyarakat sebagai sebuah sistem terhadap masalah yang dihadapinya dan pencapaian solusi terhadap masalah tersebut.<sup>6</sup>

Elite dapat diklarifikasikan atas elite lokal atau elite setempat yaitu lurah, pegawai-pegawai daerah dan pusat, guru dan tokoh-tokoh politik maupun agama dan petani kaya. Kepemimpinan elite tidak dapat dilepaskan dari sifatnya yang asli yaitu apa yang oleh wertheim (Sanit, 59, 2000) disebut sebagai Bapakisme, yaitu kesetiaan buta terhadap orang tua yang memberlakukan mirip dengan cara yang berlaku di kalangan tentara. Pemimpin merupakan tempat meminta petunjuk tentang berbagai persoalan hidup dan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, yang biasanya dituruti dengan baik.<sup>7</sup>

Pareto menyatakan bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan dalam kehidupan sosial dan politik. Kelompok kecil itu disebut dengan elit, yang mampu menjangkau pusat kekuasaan. Elit adalah orang-orang berhasil yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto mempertegas bahwa pada umumnya elit berasal dari kelas yang sama, yaitu orang-orang kaya dan pandai yang mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang musik, karakter moral dan sebagainya. Pareto lebih lanjut membagi masyarakat dalam dua kelas, yaitu pertama elit yang memerintah (governing elite) dan elit yang tiak memerintah (non governign elit).

---

<sup>6</sup>Ibid, Hal 2

<sup>7</sup>Ibid, Hal 2

Kedua, lapisan rendah (non- elite) kajian tentang elit politik lebih jauh dilakukan oleh Mosca yang mengembangkan teori elit politik<sup>8</sup>. Menurut Mosca, dalam semua masyarakat, mulai dari yang paling giat mengembangkan diri serta mencapai fajar peradaban, hingga pada masyarakat yang paling maju dan kuat selalu muncul dua kelas, yakni kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Kelas yang memerintah, biasanya jumlahnya lebih sedikit, memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang didapatkannya dari kekuasaan. Kelas yang diperintah jumlahnya lebih besar, diatur dan dikontrol oleh kelas yang memerintah.

Patrimonialisme politik adalah merupakan gambaran praktek kekuasaan pemerintahan yang diselenggarakan dan dipertahankan dengan cara bagaimana kekuasaan tersebut mampu mempertahankan kesetiaan elit politik politik yang ada. Dalam pemerintahan patrimonial, politik merupakan alat perjuangan elit politik/kelompok/klien untuk mendapatkan balas jasa dari penguasa. Penguasa dapat mempertahankan kekuasaannya dengan mempertahankan keseimbangan kelompok-kelompok/elit yang bersaing.<sup>9</sup>

Fenomena yang terjadi di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro dalam perkembangan pembangunan desa ditentukan oleh elite informal yang ada di desa tersebut, dimana elite informal itu adalah tokoh masyarakat yang juga merupakan anggota dewan. Anggota dewan memiliki kekuasaan untuk mengalokasikan dana APBD untuk dialokasikan di desa, sedangkan kasus yang terjadi di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo

---

<sup>8</sup> Murray Knuttila and Wendee Kubik, 1987, *State Theories : Classical, Global, and Feminist Perspectives*, Canada: Fernwood publishing Ltd, 54-56

<sup>9</sup>[http://mohammadikmal.wordpress.com/2013/\(22/10/2014, 11.30\)](http://mohammadikmal.wordpress.com/2013/(22/10/2014, 11.30))



Kabupaten Bojonegoro pengalokasian dana APBD di sentralkan pada pembangunan desa tersebut sehingga pembangunan infrastruktur di desa tersebut berkembang, baik dari jalan maupun infrastruktur lainnya. Banyak jalan-jalan di desa tersebut sudah mengalami perbaikan baik pavingisasi maupun pemadaman atau pemadatan jalan, hal tersebut membuktikan bahwa dengan adanya elite plural di desa dapat membantu dalam perkembangan pembangunan infrastruktur desa karena elite plural memiliki kekuasaan untuk mengalokasikan dana APBD. Selain untuk membantu perkembangan pembangunan desa, elite plural juga memiliki kepentingan lain dibalik bantuan dana APBD dalam pembangunan desa yaitu untuk menarik masyarakat desa untuk membantu elite dalam memenangkan pilihan legislatif. Pengalokasian dana APBD dalam pembangunan desa dijadikan instrumen untuk meningkatkan popularitas dan elektibilitas demi kemenangan dalam pilihan legislatif. Pengalokasian dana tersebut juga sebagai wujud timbal balik bagi masyarakat desa karena dalam pilihan legislatif sebelumnya telah membantu memenangkan elite tersebut. Suara yang diberikan oleh masyarakat kepada elite tersebut, secara tidak langsung telah menjadikan pola hubungan antara keduanya yaitu masyarakat desa memberikan suara untuk memenangkan elite dalam pilihan legislatif sedangkan elite mengalokasikan dana APBD untuk mensejahterakan masyarakat desa dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan maupun infrastruktur lainnya.

Fenomena di Desa Bibidas Lombok Timur NTB, masyarakat desa Bibidas memiliki tingkat pendidikan sangat minim jadi sensitifitas masyarakat terhadap kebijakan dari pemerintah lokal juga minim. Tanpa disadari oleh masyarakat desa

Bebidas bahwa secara tidak langsung hak mereka telah di eksploitasi oleh pemerintah desa setempat. Yang jelas tidak ada bentuk protes dari masyarakat desa Bebidas dan yang ada mereka menerima dengan apa yang terjadi. Masyarakat desa Bebidas begitu tunduk dengan pemerintah lokal, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh politik. Karena minimnya sensitifitas masyarakat desa Bebidas, membuat pemerintah lokal bertindak semena-mena dengan penyalahgunaan kekuasaan. Yang seharusnya kekuasaan digunakan untuk memajukan desa telah disalah gunakan oleh pemerintah lokal untuk kepentingan pribadi, karena pemerintah lokal merasa tidak adanya bentuk protes dari masyarakat setempat terhadap kekuasaan pemerintah lokal membuat minimnya pembangunan infrastruktur desa. Minimnya pembangunan infrastruktur di desa Bebidas karena pemerintah lokal merasa bahwa masyarakat setempat puas dengan kepemimpinan pemerintah lokal, dengan tidak adanya bentuk protes.<sup>10</sup> Peran elite dalam pembangunan infrastruktur desa sangat minim karena tidak begitu banyak pembangunan yang dilakukan oleh elite tersebut disebabkan oleh tidak adanya dorongan dari masyarakat setempat memprotes elite agar memberikan kontribusi elite untuk memajukan pembangunan infrastruktur desa.

Berdasarkan fenomena tentang birokratisasi desa dan pengaruhnya terhadap pembangunan di Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo, peranan birokrasi desa sebagai komunikator politik belum dapat dikatakan memuaskan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, kepala desa bersama-sama dengan BPD bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan rumah tangganya

---

<sup>10</sup><http://rickysharezone.blogspot.com/2012/11/proposal-makna-kebijakan-pembangunan.html?m=1>, (21/10/2014, 15.00)

sendiri. Kepala desa merupakan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan dan pembangunan dengan segala aspeknya. Dalam hal ini, BPD merupakan wadah yang menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Setiap keputusan kepala desa yang bersifat mengatur dan mempunyai akibat pembebanan terhadap masyarakat harus dimusyawarahkan dengan BPD. BPD merupakan lembaga yang seharusnya mengkomunikasikan politik pemerintah melalui musyawarah untuk mempertemukan kebijakan pemerintah dengan kepentingan masyarakat desa.<sup>11</sup>

Mekanisme yang perlu diperhatikan adalah dibentuknya Badan Perwakilan Desa. Kondisi memunculkan beberapa hal yang mengkhawatirkan, yaitu masuknya seseorang menjadi anggota BPD ada indikasi untuk menjatuhkan kepala desa terpilih. Hal ini yang banyak terjadi di Kec. Kotaanyar, karena yang bersangkutan merupakan rival kepala desa terpilih ketika pemilihan kepala desa. Keadaan ini tak lain hanya merepresentasikan bahwa BPD merupakan rival kepala desa dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari. Mekanisme lain yang perlu diperhatikan adalah dibentuknya Badan Perwakilan Desa. Pembentukan badan ini mekanismenya sama seperti yang dulu-dulu, yakni anggotanya dicalonkan oleh lembaga-lembaga masyarakat yang ada sampai dengan organisasi politik. Dengan kondisi yang seperti itu, maka memunculkan beberapa hal yang mengkhawatirkan, yaitu masuknya seseorang menjadi anggota BPD ada indikasi untuk menjatuhkan kepala desa terpilih. Hal ini karena yang bersangkutan merupakan rival atau saingan kepala desa terpilih ketika pemilihan kepala desa. Keadaan ini tak lain

---

<sup>11</sup><http://jito-um.blogspot.com/2009/05/fenomena-pemerintahan-desa-pasca.html> (21/10/1014, 15.20)

hanya merepresentasikan bahwa BPD merupakan rival atau musuh kepala desa dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari.<sup>12</sup>

Beberapa konflik yang sering muncul antara kepala desa dan BPD di wilayah Kecamatan Kotaanyar adalah konflik dalam penyusunan APBD desa, penyelesaian masalah tanah kas desa, pembuatan perdes, pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LPJ Kepala Desa), dan pungutan swadaya masyarakat dan lain sebagainya. Aneka masalah baru yang bermunculan antara lain format keanggotaan BPD, protes dari kepala desa, hingga mulai maraknya politik uang (money politics) dalam proses pemilihan anggota BPD dan kekerasan politik. Disisi lain adanya keterbatasan budget yang dimiliki oleh pemerintah desa menjadikan lembaga BPD menekan kepala desa khususnya dalam penyusunan APBD. Dan akan menjadi kendala lagi bila muncul anggapan bahwa program pemerintah hanya merupakan beban bagi masyarakat bawah. Hal ini disebabkan karena mereka merasa program-program itu bukan untuk kepentingan mereka. Sebab Lembaga BPD tidak lebih hanya dijadikan tempat lawan-lawan politik kepala desa ketika melakukan pemilihan untuk melawan kebijakan kepala desa. Karenanya keberadaan Badan Pemerintahan Desa (BPD) yang dinilai sebagai salah satu terobosan demokratisasi dan otonomi desa, ternyata malah memunculkan masalah baru di tingkat desa. Padahal, pembentukan BPD diharapkan dapat mengembangkan dinamika politik lokal (desa) sekaligus mengembangkan sosial ekonomi. Dan adanya kewenangan BPD yang berlebihan karena berkaca pada kewenangan DPR. Dengan mengidentikkan diri sebagai

---

<sup>12</sup>Ibid

legislatifnya desa membuat perannya berkesan arogan. BPD yang seharusnya berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa menjelma menjadi momok pemerintah desa. Kepala desa dan perangkat ketakutan apabila sewaktu-waktu dijatuhkan BPD. Ini karena fungsi BPD sebagai pengayom kelestarian adat, legislasi, pengawasan (pengawasan pelaksanaan peraturan desa, APBD dan keputusan kepala desa) serta menampung aspirasi rakyat menjadi kabur. Pengawasan juga diartikan meliputi kinerja perangkat desa, termasuk segi positif kepala desa dan perangkat, sehingga akan memacu etos kerjanya sebagai pelayan masyarakat. Namun di sisi lain tidak jarang ditunggangi unsur subjektif, yaitu suka atau tidak suka, apalagi bila merupakan imbas pemilihan kepala desa yang dapat memicu ketidakharmonisan hubungan antara BPD dan pemerintah desa.<sup>13</sup>

Fenomena pembangunan di Desa Kelanga sebagai salah satu desa di daerah Kabupaten Natuna, dalam pembangunannya, salah satunya pembangunan desa telah berupaya menempatkan partisipasi politik masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan terhadap pembangunan desa dengan melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan program, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi pembangunan desa sesuai dengan substansi yang terkandung dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004. Namun karena pelaksanaan pembangunan desa yang melibatkan peran aktif dari masyarakat merupakan fenomena baru bagi masyarakat, dimana selama ini pelaksanaan pembangunannya jarang sekali melibatkan partisipasi masyarakatnya. Walaupun ada, partisipasi masyarakat hanya bersifat manipulatif belaka. Pada Desa Kelanga, partisipasi politik

---

<sup>13</sup>Ibid

masyarakat dalam pembangunan desa belum diimbangi dengan adanya proses pemilihan yang memadai, melainkan hanya sekedar bentuk baru dari tanggapan masyarakat terhadap manipulasi para elite atas kehidupan politik nasional mereka. Padahal proses partisipasi politik masyarakat merupakan bagian penting dari pembangunan desa di mana ia selalu berhadapan dengan berbagai rintangan dan halangan terhadap tindakan yang kaku ataupun penghasut-penghasut yang membahayakan. Partisipasi politik masyarakat nampaknya terbentur dengan minimnya pertemuan untuk memusyawarahkan tentang program pembangunan desa yang akan dijalankan, hal ini terlihat dengan beberapa orang tertentu saja yang terlibat dalam pertemuan musyawarah desa.<sup>14</sup>

Fenomena pembangunan desa sering dijadikan instrumen bagi elite yang memiliki kepentingan pencalonan dalam pemilihan umum. Kasus tersebut terjadi dalam pembangunan infrastruktur verocement di Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro. Dalam pembangunan tersebut dilaksanakan oleh kontraktor akan tetapi setelah pembangunan itu selesai ada elite yang akan mencalonkan diri dalam pilihan legislatif memiliki kepentingan untuk meningkatkan popularitas dan elaktibilitas di desa tersebut. Ada hubungan antara kontraktor pelaksana dengan elite tersebut karena keduanya merupakan kader politik dari partai politik yang sama sehingga kedua pihak tersebut merencanakan pembangunan tersebut digunakan sebagai instrumen untuk menarik masyarakat setempat untuk memberikan suara kepada elite maupun partai politik dalam pilihan legislatif. Dalam pembangunan tersebut melibatkan masyarakat setempat

---

<sup>14</sup><http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25235/4/Chapter%20I.pdf> (21/10/2014, 16.30)

dan masyarakat setempat dijadikan tim kemenangan sebagai bukti kepada masyarakat bahwa elite tersebut ikut berperan dalam pembangunan tersebut. Peran elite dalam pembangunan tersebut adalah pengalokasian dana pembangunan berasal dari partai politik sedang elite mencalonkan diri dari partai politik tersebut sehingga memudahkan elite itu untuk mempengaruhi pemikiran masyarakat setempat dan untuk memperoleh suara dari masyarakat setempat. Pembangunan infrastruktur desa tersebut dijadikan instrumen oleh elite untuk meningkatkan popularitas dan elaktibilitas. Dengan bantuan masyarakat yang bekerja dalam pembangunan, elite melalakan kampanye kepada masyarakat sekitar dan menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur berasal dari partai politik dan elite tersebut merupakan salah satu kader dari partai politik tersebut yang secara tidak langsung elite tersebut juga ikut berperan dalam pembangunan tersebut yaitu dalam pengalokasian dana pembangunan.

Dalam penelitian ini menarik untuk membahas peranan elite dalam pembangunan desa, peran elite dalam pembangunan desa memiliki kepentingan tersendiri. Namun dalam pembahasan ini bukan elite formal akan tetapi lebih membahas peran elite informal. Dalam pembahasan ini elite informal lebih memiliki kepentingan besar dalam pembangunan desa yaitu untuk meningkatkan popularitas dan elaktibilitas baik elite tersebut yang merupakan calon legislatif maupun partai politik. Elite informal mencari dana dan mengalokasikan dana pembangunan infrastruktur jalan desa hanya untuk kepentingan meningkatkan popularitas dan elaktibilitas calon legiflatif maupun partai politik. Tidak hanya dalam pengalokasian dana pembangunan infrastruktur jalan desayang dijadikan

intrumen untuk meningkat popularitas dan elaktibilitas akan tetapi pembangunan sekolahan di desa juga dijadikan instrumen untuk menarik para wali murid agar membantu elite tersebut dalam pemilihan legislatif. Menarik jika membahas kepentingan elite dalam pembangunan desa untuk itu dalam penelitian ini membahas peran elite dalam pembangunan desa, karena dalam penelitian dapat mengetahui kepentingan apa yang diharapkan elite dan respon dari dari masyarakat desa.

## **2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Kepentingan Elite informal Dalam Pengalokasian Dana Pembangunan Di Desa Temayang Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro ?
2. Bagaimana Implikasi Kepentingan Elite informal Terhadap Pengalokasian Dana Pembangunan Di Desa Temayang Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro ?

## **3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Kepentingan Elite informal Dalam Pengalokasian Dana Pembangunan Di Desa Temayang Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk Mengetahui Kepentingan Elite informal Terhadap Pengalokasian Dana Pembangunan Di Desa Temayang Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro



#### 4. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan, khususnya dalam kajian ilmu politik.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bagi elite dan masyarakat di Desa Temayang Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro untuk saling memberi ruang gerak berdasarkan fungsi dan perannya masing-masing.
3. Secara metodologis, dapat menjadi kajian bagi peneliti selanjutnya utamanya bagi yang meneliti pada hal yang sama dan sesuai dengan kebutuhan praktis maupun teoritis dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan.

#### 5. Kerangka Teoritik

##### 5.1. Teori Elite<sup>15</sup>

Elite dijelaskan sebagai minoritas pribadi-pribadi yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial, efektif dan bertanggung jawab, dimana efektifitas dalam hal ini merujuk pada pelaksanaan kegiatan kepentingan dan perhatian kepada orang lain pada tempat dimana golongan elite ini memberikan tanggapannya.

Elite disini memiliki korelasi dengan kepemimpinan sosial, kepemimpinan sosial ialah salah satu kekuatan yang menyangga masyarakat yang teratur. Korelasi yang

---

<sup>15</sup> Keller, Suzanne. 1984. Penguasa dan Kelompok Elit, Jakarta, Rajawali.

dimaksudkan ialah hubungan dimana dalam sebuah kolektivitas, elite merupakan salah satu yang dianggap pening dan berkuasa sehingga dalam praktik sosialnya elite menjadi pemimpin yang bertanggung jawab atas berlangsungnya kehidupan sosial di masyarakat tempat ia menjadi elite.

Pada pengantar ini, dijelaskan tentang dua perspektif pokok yang menandai studi kaum elite yang telah lalu, yaitu yang bersifat moral dan yang fungsional. Yang pertama menitik beratkan pada keutamaan moral pribadi-pribadi, dan yang kedua pada peranan fungsional dari suatu lapisan. Namun kedua perspektif tersebut berpangkal dari adanya suatu kelompok orang yang disisahkan dari selebihnya (masyarakat) dengan suatu perangkat kewajiban dan ganjaran atau hak-hak nyata. Yang satu bertanggung jawab atas eksistensi kelompok-kelompok elite dalam arti superioritas pribadi-pribadi tertentu, yang satu lagi dalam arti fungsi sosial suatu kelas atau kelompok. Dalam hal ini pendekatan moral nantinya bias merosot menjadi mistisisme, dan pendekatan fungsional menjadi tautologi, atau perulangan yang tak berarti.

Teori-teori yang berpengaruh tentang elite.

Elite merupakan sebuah studi yang menarik dan menghimbau para pemikir dari banyak disiplin ilmu. Terlihat dari banyaknya pakar-pakar sosial, filsafat dan politik yang membahas mengenai permasalahan elite ini, namun kebanyakan dari beberapa pakar merujuk kembali kepada hasil pemikiran Pareto dan Mosca, seolah-olah hanya dengan menyebut dua nama itu sudah menjamin jalur aman melintasi daerah intelektual tentang elite ini.

Dalam bab ini diungkapkan secara ringkas tentang karya-karya yang berhubungan dengan masalah-masalah umum tentang hubungan antara golongan elite dengan masyarakat. Karya-karya tersebut dibagi menjadi dua golongan utama:

1. Golongan yang memilih golongan elite tunggal (elite politik) yang membuat keputusan dalam masyarakat ; Aristoteles, Pareto dan Mosca.
2. Golongan yang mempertahankan bahwa ada sejumlah kaum elite yang berkoeksistensi, berbagai kekuasaan, tanggung jawab, serta hak-hak atau imbalan ; Saint Simon, Karl Mannheim dan Raymond Aron.

#### Elite Penentu: Anteseden Sejarah

Dalam bab ini membicarakan tentang sebab-sebab munculnya elite-elite penentu, dimana dijelaskan adanya elite sekarang ini merupakan sesuatu yang lahir dan berkembang dari fenomena yang sama atau menyerupai yang terjadi pada peradaban-peradaban sebelumnya.

Elite-elite penentu merupakan suatu kristalisasi, suatu perkembangan lebih lanjut dari kelas-kelas penguasa, jadi mereka tidak bias dianggap setara dalam fungsinya tetapi setara sebagai alternatif-alternatif struktural dari kelas-kelas penguasa dan kasta-kasta penguasa, yang mewakili suatu bentuk kepemimpinan sosial yang lebih berspesialisasi dan lebih maju.

Suzanne Keller membagi tipe-tipe kepemimpinan sosial menjadi lima:

1. Kasta Penguasa : suatu lapisan yang menjalankan tugas sosial yang paling penting yakni membina masyarakat melalui reproduksi biologis dan dengan prestise yang paling tinggi. Kasta penguasa dipisah oleh ; agama,

kekerabatan, bahasa, daerah tempat tinggal kedudukan ekonomi serta aktivitas jabatan.

2. Aristokrasi : suatu lapisan tunggal yang menguasai fungsi-fungsi sosial yang menentukan, dan terbentuk dari ikatan-ikatan keluarga melalui kekerabatan dan kekayaan, tetapi tidak terdapat spesialisasi jabatan seperti sistem kast.
3. Estate Pertama : suatu lapisan yang ditentukan secara legal dalam suatu masyarakat yang sistem politiknya terpusat.
4. Kelas Penguasa : suatu lapisan tunggal yang dibebani dengan berbagai fungsi sosial yang penting. Menurut sejarah kelas penguasa telah mendasarkan pertimbangan utama mereka melalui kekuasaan ekonomi bukan politik.
5. Elite-Elite Penentu : beberapa lapisan sosial menyediakan orang-orang untuk posisi-posisi sosial yang intim, dimana fungsi sosial diperluas dan dispesialisasikan dan mereka (elite) dibina dengan suatu cara sesuai dengan tugas mereka.

Suzanne Keller juga membedakan asal usul antara Elite Penentu dan Kelas sosial. Jika elite penentu memiliki asal usul yang terletak dalam sifat heterogen masyarakat berdasarkan usia, jenis kelamin, kesukuan, kecakapan, kekuatan dan sebagainya. Sedangkan kelas sosial terletak dalam pembagian kerja dalam masyarakat.

Sedangkan Dahrendorf mengklasifikasi kelas penguasa menjadi tiga kelompok yakni ;

1. Kepala-kepala perhimpunan khusus yang muncul di dalam sebuah tatanan masyarakat.
2. Birokrat, baik yang merumuskan kebijakan maupun yang melaksanakan.
3. Elite pemerintah.

Selain itu pada bab ini Suzanne Keller membedakan antara kelas penguasa dengan elite penentu, berdasarkan beberapa kriteria yakni; jumlah, ukuran, tenggang waktu, cara masuk, cara keluar, ruang lingkup otoritas, ikatan-ikatan kebudayaan dan kesempatan.

#### Fungsi-Fungsi Sosial Elite Penentu

Pada bab ini Suzanne Keller ingin keluar dari pembahasan yang bersifat umum dimana pengertian elite mengabdikan pada fungsi sosial merupakan sesuatu yang umum yang sering dijumpai dalam banyak tulisan mengenai elite. Suzanne Keller, sedikit lebih keluar dari generalisasi tersebut untuk menelusuri keterkaitan yang timbul antara para elite tersebut dengan mengacu pada fungsi-fungsi sosial mereka. Pemaknaan yang umum tersebut sering kali menyembunyikan pendapat bahwa elite itu berkuasa atas masyarakat atau bahwa elite adalah kelompok-kelompok yang unggul dalam status dan kekuasaan.

Sedangkan, pendapat Marx akan masyarakat dimana masyarakat ialah kelompok yang dijalankan oleh kekuatan kelas penguasa kapitalis yang mengacu pada zamannya kekuatan tersebut memang banyak dinyatakan dalam bidang ekonomis. Smith, Saint Simon, Marx dan Pareto memusatkan perhatian, bahwa

masyarakat merupakan suatu kumpulan nilai-nilai bersama yang terdiri dari suatu perangkat kekuatan sosial yang dinamis yang bersaing dan bertentangan. Antara kelompok minoritas yang berkuasa dengan kelompok yang tertindas.

Namun dilain sisi Durkheim memiliki konsepsi yang sangat bertimbal balik dengan tokoh di atas, ia tidak mengembangkan teori tunggal maupun yang bercabang-cabang mengenai kekuasaan. Ia melihat masyarakat lebih banyak dibimbing oleh norma-norma moral, baik yang dipegang oleh semua orang (masyarakat primitive dan sederhana) atau didistribusikan secara berbeda-beda (masyarakat moderndan kompleks).

Model fungsional dari sistem sosial ialah masyarakat dipersatukan, pada satu pihak oleh nilai-nilai bersama serta mekanisme kelembagaan, dan pada sisi lain dipersatukan oleh aktivitas-aktivitas dan kepentingan-kepentingan mereka. Menurut Suzanne Keller masyarakat ialah suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung yang memerlukan orientasi dan pimpinan umum yang bersatu sehingga bagian-bagian yang lain dapat berjalan selaras.

Klasifikasi tipe-tipe elite menurut Suzanne Keller terdiri dari :

- Golongan elite yang mewakili kepentingan umum : pejabat nasional, presiden, kabinet, anggota senat, dan wakil rakyat.
- Golongan elite integrative : pendeta-pendeta terkemuka, ahli-ahli filsafat, para pendidik dan “keluarga-keluarga pertama”.
- Golongan elite yang berhubungan dengan kebutuhan sekunder manusia : para seniman dan penulis terkemuka, bintang film, dan atlit-atlit terkenal.

Sedangkan klasifikasi tipe elite menurut Parsons ada tiga ;

- Elite militer : terdiri dari perwira berpangkat tinggi. Fungsinya mencakup perlindungan dan pertahanan masyarakat.
- Elite diplomatic : terdiri dari para duta besar dan duta yang mengawasi hubungan umum keluar masyarakat. Fungsinya menjaga hubungan dan komunikasi eksternal masyarakat.
- Elite ilmiah : para penemu, dan teknisi. Tujuannya ialah memberikan inovasi kepada masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap alam dan manusia.

Elite eksternal dan elite internal dalam penggolongan ini perbedaan terletak pada cara-cara organisasi. Yang mana elite eksternal lebih bersifat despotis daripada elite internal yang terpancar dan kurang terorganisir.

## **1.6. Konseptualisasi**

### **1.6.1. Elite**

Elite selalu sedikit itulah jawaban awal dari pertanyaan ini. Jumlah elite selalu lebih sedikit dibandingkan dengan yang dikuasai, kenyataannya secara praktis tidak mungkin dan tidak seharusnya terjadi sebaliknya. Sudah menjadi dalil pemikiran politik bahwa kekuasaan dalam masyarakat didistribusikan dengan tidak merata. Dalam konteks pedesaan, elite formal adalah para elite yang mempunyai kedudukan resmi dalam struktur pemerintahan desa, seperti kepala desa, kepala hansip, ketua RT, ketua RW. Sedangkan Elite informal adalah mereka yang mempunyai pengaruh yang diakui sebagai pemimpin oleh suatu kelompok

tertentu maupun oleh seluruh masyarakat desameskipun tidak menduduki posisi resmi dalam pemerintahan desa. Mereka itu isa kyai,guru, militer, orang kaya dan sebagainya. Tiga kemungkinan elit politik yang membuat keputusan politik, yaitu :

Elite formal : elite politik yang menurut undang-undang memiliki wewenang memuat keputusan-keputusan. Orang yang berpengaruh yang memiliki pengaruh kuat lewat sumber-sumber kekuasaan, kekayaan , ilmu pengetahuan dan teknologi, senjata, dan massa. Organisasi yang mampu memengaruhi elit formal sehingga dapat mengambil keputusan sesuai kehendak orang yang berpengaruh.<sup>16</sup>

### **I.6.2. Kepentingan**

Kepentingan dalam artikulasinya yang paling umum disemua sistem politik adalah pengajuan permohonan secara individual kepada anggota dewan kota, parlemen, pejabat pemerintahan atau dalam masyarakat tradisional kepada kepala desa atau ketua suku.<sup>17</sup>

### **I.6.3. Pembangunan**

Arti pengertian dari pembangunan pada umumnya adalah pembangunan itu tiada lain adalah suatu usasha perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan kepada norma-norma tertentu. Perubahan-perubahan yang direncanakan dengan pendayagunaan/potensi alam, manusia, dan social budaya inilah disebut pembangunan. Potensi alam harus digali, dikembangkan dan

<sup>16</sup> Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik, Grasindo.

<sup>17</sup> Menurut Drs. Sukarna, yang dikutip dari artikel Sistem Politik Indonesia karya Drs, a. Rachman MM.



dimanfaatkan sebaik-baiknya seperti tanah, hutan, mineral. Potensi manusia dengan jumlah penduduk yang sangat besar harus ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilannya, sehingga mampu menggali, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi alam tersebut semaksimal mungkin. Jadi, pembangunan nasional suatu bangsa sebenarnya adalah merupakan suatu usaha raksasa dari bangsa itu, untuk mencapai kesejahteraan lahir batin yang bukan saja menjadi idam-idaman dari setiap warga Negara dan bangsa yang bersangkutan, melainkan pula merupakan cita-cita setiap umat manusia.<sup>18</sup>

## **1.7. Metode Penelitian**

### **1.7.1. Jenis penelitian**

Metode penelitian yang dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian deskriptif adalah suatu pengumpulan fakta-fakta dari suatu keadaan yang bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang sesuatu dengan jelas terhadap suatu keadaan.<sup>19</sup> Penelitian yang bersifat kualitatif ini, informasi didapatkan secara langsung dari informan yang terkait. Dari informan tersebut, data-data yang didapat kemudian akan diolah oleh peneliti.

<sup>18</sup> Baratha, I Nyoman. 1982. *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, hal 65

<sup>19</sup> David Marsh, Gerry Stocker. 2010. *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media.

### **1.7.2. Unit Analisis**

Unit analisis dalam penelitian adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam pengertian yang lain, Unit analisis diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus/ komponen yang diteliti. Unit analisis ini dilakukan oleh peneliti agar validitas dan reabilitas penelitian dapat terjaga. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individual dan organisasi. Dalam penelitian ini individual adalah elit informal, yaitu tokoh masyarakat dan juga merupakan kader partai politik.

### **1.7.3. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini, dilakukan di Desa Temayang Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro. Lokasi penelitian ini ditentukan oleh peneliti dengan sengaja dikarenakan penelitian ini mampu menjelaskan tentang fenomena kepentingan elit dalam pengalokasian dana pembangunan di Desa Temayang Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro.

#### **1.7.3.1. Subyek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah elit informal yaitu tokoh masyarakat dan juga merupakan kader partai politik dan aparatur pemerintah desa dan penduduk desa. Dalam penelitian ini diperlukan adanya subjek penelitian, subjek penelitian ini adalah informan. Informan merupakan narasumber yang dapat memberikan sebuah informasi dan penjelasan-penjelasan yang diperlukan peneliti dalam proses penelitian.

Informan dalam penelitian ini ditentukan oleh peneliti, alasan peneliti menentukan informannya karena informan tersebut dianggap akan mampu

memberikan segala informasi yang di butuhkan peneliti. Informan yang dpilih juga merupakan informan yang mengetahui dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan oleh peneliti.

Informan yang peneliti wawancara dalam penelitian ini adalah:

- a. Bapak Tholib Kepala Desa Temayang
- b. Ibu Eni Sekretaris Desa Temayang
- c. Bapak Noer Chozin dan Bapak Edi Elit Informal
- d. Bapak Ali Mustofa BPD, Suyitno Kepala Dusun, dan Dawam KAUR Pembangunan
- e. Bapak Sungkono Ketua Kelompok Masyarakat Gunung Piling dan Usholi Ketua Kelompok Masyarakat Randu Alas

Yang nantinya akan mampu menjelaskan dan menjawab pertanyaan peneliti serta dapat memberikan data-data yang nantinya akan dijadikan peneliti sebagai data pendukung penelitian.

#### **1.7.4. Teknik Pengumpulan Data**

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif pada penelitian ini, peneliti dalam teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara langsung dengan informan yang dituju. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik, memang teknik-teknik pengumpulan data harus dilakukan dengan baik dan teratur.

### **1.7.5.1.Wawancara**

Dalam penelitian kualitatif, data utama adalah dengan cara melakukan wawancara dengan informan yang terkait dengan penelitian ini. Dengan wawancara secara langsung, peneliti akan mendapatkan data-data utama untuk mampu menjawab segala pertanyaan-pertanyaan peneliti. Dalam teknik wawancara, peneliti harus terlebih dahulu meminta izin kepada informan untuk bersedia melakukan wawancara. Dalam proses wawancara, sebaiknya peneliti menyiapkan alat bantu untuk melancarkan kegiatan tersebut. Seperti catatan buku, alat perekam bisa menggunakan handphone. Agar wawancara dapat terkontrol dengan baik, maka peneliti terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan pokok penelitian agar tidak mengarah kemana-mana.

### **1.7.5. Jenis Data**

Di dalam jenis data ini, terdapat dua jenis data yang di dapat oleh peneliti, yang pertama adalah data-data utama atau primer serta data sekunder sebagai data sampingan untuk lebih melengkapi data primer dalam penelitian ini.

### **1.7.6.1.Data Primer**

Data primer yang biasa disebut sebagai data utama dari setiap penelitian ini didapat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan tema penelitian. Peneliti terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan pokok utama yang nantinya akan ditanyakan kepada informan. Pertanyaan yang ditanyakan kepada informan untuk mendapatkan data utama sebaiknya diatur

secara berurutan agar informan mudah dalam menjelaskan permasalahan yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

#### **1.7.6.2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data-data yang didapat untuk mendukung data-data primer. Data sekunder di dapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari buku harian, notulen rapat perkumpulan, dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Data sekunder juga dapat berupa koran harian, majalah, publikasi dari berbagai organisasi, lampiran-lampiran dari badan-badan resmi seperti kementerian-kementerian, skripsi terdahulu, tesis, hasil survey, studi histories, dan sebagainya.

#### **1.7.6. Teknik analisis data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Alasan penggunaan metode kualitatif:<sup>20</sup> pertama, lebih mudah menyesuaikan di lapangan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda: kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat peneliti dengan subjek penelitian. Teknik analisis data ini bertujuan untuk menyusun data agar tersusun rapi, dimana di mulai dari wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait serta kumpulan bahan-bahan yang didapat untuk menunjang penelitian. Selain itu data-data primer dan data sekunder yang di dapat peneliti juga akan menunjang dalam menganalisis data.

---

<sup>20</sup>Ida Bagoes Mantra. 2004. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Proses analisis data ini dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan:<sup>21</sup>

- Reduksi data atau penyederhanaan data, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.
- Paparan data, menyusun data dalam satu kesatuan.
- Penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu kegiatan menyimpulkan makna-makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokkannya.

Dalam proses menganalisis data yang dilakukan pertama kali adalah mentranskrip hasil wawancara dan ditata dengan baik sesuai urutan-urutan pertanyaan permasalahan dalam penelitian. Setelah itu dilakukan pemetaan dan penyederhanaan data, kemudian dilakukan penyusunan data agar tersusun rapi. Langkah selanjutnya adalah menganalisis hasil temuan data dengan menghubungkan teori yang relevan, setelah itu mulai menyusun suatu kesimpulan.

---

<sup>21</sup>Lisa Horrison. 2007. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Pernada Group.